

PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan hasil evaluasi jabatan sebagai dasar penetapan nilai dan kelas jabatan dalam rangka penataan manajemen aparatur sipil negara serta pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu menetapkan jabatan dan kelas jabatan;
b. bahwa penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya yang diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB II
JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Jabatan Manajerial; dan
    b. Jabatan Nonmanajerial.
(3) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
    a. jabatan pimpinan tinggi madya;
    b. jabatan pimpinan tinggi pratama;
    c. jabatan administrator; dan
    d. jabatan pengawas.
(4) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. jabatan fungsional; dan
    b. jabatan pelaksana.
(5) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat Jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 3

(1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
(2) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi.
(2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam jabatan administrasi.

(3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a didasarkan pada:
   a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional; atau
   b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional.
(4) Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pelaksana.
(5) Kelas Jabatan bagi Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan staf khusus Menteri.

BAB III
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5
Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 6
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2) Besaran dan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2026

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 286

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN MANAJERIAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
I	**SEKRETARIAT JENDERAL**	
1	SEKRETARIS JENDERAL	17
2	KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	15
3	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN DAN EVALUASI KINERJA	13
4	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	13
5	KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	13
6	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
7	KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, ORGANISASI, DAN KETATALAKSANAAN	15
8	KEPALA BAGIAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	13
9	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	13
10	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN	13
11	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
12	KEPALA BIRO BARANG MILIK NEGARA	15
13	KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	13
14	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
15	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA	13
16	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
17	KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA	15
18	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA	13
19	KEPALA BAGIAN HUKUM	13
20	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
21	KEPALA BIRO UMUM	15
22	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	13
23	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI	10
24	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI	10
25	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL, STAF AHLI, DAN STAF KHUSUS	10
26	KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL	10
27	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA	13
28	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM	10
29	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN	10
30	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
II	**INSPEKTORAT JENDERAL**	
31	INSPEKTUR JENDERAL	17
32	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	15
33	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	13
34	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
35	KEPALA BAGIAN UMUM	13
36	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10
37	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10
38	INSPEKTUR WILAYAH I	15
39	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
40	INSPEKTUR WILAYAH II	15
41	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
42	INSPEKTUR WILAYAH III	15
43	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
44	INSPEKTUR WILAYAH IV	15
45	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
III	**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**	
46	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI	17
47	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	15
48	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN	13
49	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	13
50	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA	13
51	KEPALA BAGIAN UMUM DAN BARANG MILIK NEGARA	13
52	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10
53	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10
54	DIREKTUR VISA DAN DOKUMEN PERJALANAN	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
55	KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN VISA	13
56	KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	13
57	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARISASI VISA DAN DOKUMEN PERJALANAN	13
58	KEPALA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI VISA DAN DOKUMEN PERJALANAN	13
59	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
60	DIREKTUR IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	15
61	KEPALA SUBDIREKTORAT IZIN TINGGAL	13
62	KEPALA SUBDIREKTORAT ALIH STATUS KEIMIGRASIAN	13
63	KEPALA SUBDIREKTORAT PENENTUAN STATUS KEIMIGRASIAN	13
64	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
65	DIREKTUR INTELIJEN KEIMIGRASIAN	15
66	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN DAN OPERASI INTELIJEN	13
67	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN KEIMIGRASIAN	13
68	KEPALA SUBDIREKTORAT PRODUK INTELIJEN KEIMIGRASIAN	13
69	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
70	DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	15
71	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	13
72	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN	13
73	KEPALA SUBDIREKTORAT TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN	13
74	KEPALA SUBDIREKTORAT PENANGANAN DETENI DAN KOORDINASI PENANGANAN PENGUNGSI	13
75	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
76	DIREKTUR KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DAN BINA PERWAKILAN	15
77	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN ORGANISASI INTERNASIONAL	13
78	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA ANTARNEGARA	13
79	KEPALA SUBDIREKTORAT BINA PERWAKILAN	13
80	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
81	DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL	15
82	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN	13
83	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI ADVOKASI DAN INVESTIGASI INTERNAL	13
84	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
85	DIREKTUR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	15
86	KEPALA SUBDIREKTORAT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI LAUT	13
87	KEPALA SUBDIREKTORAT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI UDARA	13
88	KEPALA SUBDIREKTORAT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DARAT	13
89	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
90	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	15
91	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
IV	**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**	
92	DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN	17
93	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	15
94	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN ANGGARAN	13
95	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
96	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	13
97	KEPALA BAGIAN UMUM DAN BARANG MILIK NEGARA	13
98	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10
99	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10
100	DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN	15
101	KEPALA SUBDIREKTORAT STRATEGI DAN TRANSFORMASI ORGANISASI	13
102	KEPALA SUBDIREKTORAT STRATEGI PROGRAM PEMASYARAKATAN DAN KERANGKA PENDANAAN	13
103	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
104	DIREKTUR PELAYANAN TAHANAN DAN ANAK	15
105	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PELAYANAN TAHANAN DAN ANAK	13
106	KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN TAHANAN DAN ANAK	13
107	KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN PELINDUNGAN HUKUM	13
108	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
109	DIREKTUR PEMBINAAN NARAPIDANA DAN ANAK BINAAN	15
110	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PEMBINAAN NARAPIDANA DAN ANAK BINAAN	13
111	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN	13
112	KEPALA SUBDIREKTORAT INTEGRASI	13
113	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
114	DIREKTUR PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI	15
115	KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN DASAR DAN KEBUTUHAN KHUSUS	13
116	KEPALA SUBDIREKTORAT REHABILITASI	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
117	KEPALA SUBDIREKTORAT KEBUTUHAN DASAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	13
118	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
119	DIREKTUR PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN	15
120	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN	13
121	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDAMPINGAN KLIEN DAN UPAYA KEADILAN RESTORATIF PEMASYARAKATAN	13
122	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KLIEN PEMASYARAKATAN	13
123	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
124	DIREKTUR PENGAMANAN DAN INTELIJEN	15
125	KEPALA SUBDIREKTORAT INTELIJEN PEMASYARAKATAN	13
126	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN PEMELIHARAAN KEAMANAN	13
127	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PEMULIHAN	13
128	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
129	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA PEMASYARAKATAN	15
130	KEPALA SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI	13
131	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA PEMASYARAKATAN	13
132	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
133	DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL	15
134	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN	13
135	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI ADVOKASI DAN INVESTIGASI INTERNAL	13
136	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
V	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
137	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	17
138	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	15
139	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJA SAMA	13
140	KEPALA BAGIAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	13
141	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	13
142	KEPALA BAGIAN UMUM	13
143	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	10
144	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10
145	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI	15
146	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
147	KEPALA PUSAT PELATIHAN	15
148	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
VI	**POLITEKNIK IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN INDONESIA**	
149	DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN INDONESIA	15
150	WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	14
151	WAKIL DIREKTUR BIDANG KEUANGAN DAN UMUM	14
152	WAKIL DIREKTUR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	14
153	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM	13
154	KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REFORMASI BIROKRASI	10
155	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	10
156	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	10

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
157	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJA SAMA	13
158	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK	10
159	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	10
160	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ADMINISTRASI KERJA SAMA	10
VII	**PUSAT DATA, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	
161	KEPALA PUSAT DATA, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15
162	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK	13
163	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
VIII	**PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN**	
164	KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN	15
165	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
IX	**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TIPE A**	
166	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TIPE A	15
167	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	13
168	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PEMBINAAN	13
169	KEPALA BIDANG PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN	13
170	KEPALA BIDANG PERAWATAN, PENGAMANAN, DAN KEPATUHAN INTERNAL	13
X	**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TIPE B**	
171	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TIPE B	14
172	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	13
173	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PEMBINAAN	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
174	KEPALA BIDANG PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN	13
XI	**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TIPE A**	
175	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TIPE A	15
176	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	13
177	KEPALA BIDANG DOKUMEN PERJALANAN, IZIN TINGGAL, DAN STATUS KEIMIGRASIAN	13
178	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	13
179	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN KEPATUHAN INTERNAL	13
XII	**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TIPE B**	
180	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TIPE B	14
181	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	13
182	KEPALA BIDANG DOKUMEN PERJALANAN, IZIN TINGGAL, DAN STATUS KEIMIGRASIAN	13
183	KEPALA BIDANG PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DAN KEPATUHAN INTERNAL	13
XIII	**KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI**	
184	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI	14
185	KEPALA BIDANG DOKUMEN PERJALANAN DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	12
186	KEPALA SEKSI DOKUMEN PERJALANAN	9
187	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9
188	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	12
189	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9
190	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9
191	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	12

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
192	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	9
193	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
194	KEPALA BIDANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	12
195	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN I	10
196	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN II	10
197	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN III	10
198	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN IV	10
199	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	12
200	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9
201	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
XIV	**KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI**	
202	KEPALA KANTOR IMIGRASI I KHUSUS NON TPI	14
203	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN	12
204	KEPALA SEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	9
205	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DAN ADJUDIKASI DOKUMEN PERJALANAN	9
206	KEPALA BIDANG IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	12
207	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9
208	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9
209	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	12
210	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9
211	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
212	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	12
213	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	9
214	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
215	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	12
216	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9
217	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
XV	**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI**	
218	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI	13
219	KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	10
220	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	8
221	KEPALA SUBSEKSI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN	8
222	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	10
223	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8
224	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8
225	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	10
226	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8
227	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8
228	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	10
229	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8
230	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
231	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
232	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
233	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
234	KEPALA URUSAN UMUM	8
XVI	**KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI**	
235	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI	13
236	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN	10
237	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	8
238	KEPALA SUBSEKSI VERIFIKASI DAN ADJUDIKASI DOKUMEN PERJALANAN	8
239	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	10
240	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8
241	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8
242	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	10
243	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8
244	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8
245	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	10
246	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8
247	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
248	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
249	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
250	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
251	KEPALA URUSAN UMUM	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
XVII	**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI**	
252	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI	12
253	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9
254	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	8
255	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8
256	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9
257	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8
258	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8
259	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
260	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8
261	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
262	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
263	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
264	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
265	KEPALA URUSAN UMUM	8
XVII	**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI**	
266	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI	12
267	KEPALA SEKSI DOKUMEN DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9
268	KEPALA SUBSEKSI DOKUMEN PERJALANAN	8
269	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8
270	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
271	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8
272	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8
273	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
274	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8
275	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
276	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
277	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
278	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
279	KEPALA URUSAN UMUM	8
XIX	**KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI**	
280	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI	10
281	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8
282	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI, INTELIJEN, DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
283	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
XX	**KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI**	
284	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI	10
285	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN KEIMIGRASIAN	8
286	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI, INTELIJEN, DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
287	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
XXI	**RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT**	
288	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT	14

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
289	KEPALA BIDANG REGISTRASI DAN PERAWATAN	12
290	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9
291	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9
292	KEPALA SEKSI KESEHATAN	9
293	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, KEAMANAN, PEMULANGAN, DAN DEPORTASI	12
294	KEPALA SEKSI PENEMPATAN	9
295	KEPALA SEKSI KEAMANAN	10
296	KEPALA SEKSI PEMULANGAN DAN DEPORTASI	9
297	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	12
298	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9
299	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9
300	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
XXII	**RUMAH DETENSI IMIGRASI**	
301	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI	12
302	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI, DAN PELAPORAN	9
303	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
304	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	8
305	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	10
306	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	9
307	KEPALA SUBSEKSI KETERTIBAN	9
308	KEPALA SEKSI PERAWATAN DAN KESEHATAN	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
309	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8
310	KEPALA SUBSEKSI KESEHATAN	8
311	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
312	KEPALA URUSAN UMUM	8
313	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
314	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
XXIII	**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I**	
315	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I	14
316	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	12
317	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	12
318	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9
319	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
320	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9
321	KEPALA BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA	12
322	KEPALA SEKSI REGISTRASI	9
323	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	9
324	KEPALA SEKSI PERAWATAN NARAPIDANA	9
325	KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA	12
326	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KERJA	9
327	KEPALA SEKSI SARANA KERJA	9
328	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HASIL KERJA	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
329	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	12
330	KEPALA SEKSI KEAMANAN	9
331	KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	9
XIV	**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA**	
332	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	13
333	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	10
334	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
335	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
336	KEPALA URUSAN UMUM	8
337	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	10
338	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
339	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8
340	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	10
341	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8
342	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8
343	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	10
344	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
345	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
XXV	**LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS IIB**	
346	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB	12
347	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
348	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
349	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
350	KEPALA URUSAN UMUM	8
351	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9
352	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
353	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	8
354	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8
355	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEMANAN DAN TATA TERTIB	9
356	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
357	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
XXVI	**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III**	
358	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III	10
359	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
360	KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI	8
361	KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN	8
362	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	8
XXVII	**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I**	
363	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I	13
364	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
365	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
366	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
367	KEPALA URUSAN UMUM	8
368	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	9
369	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
370	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
371	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8
372	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	9
373	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
374	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
375	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8
XXVIII	**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II**	
376	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II	10
377	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
378	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	8
379	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	8
XXIX	**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I**	
380	KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I	13
381	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	10
382	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	8
383	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8
384	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	10
385	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
386	KEPALA SUBSEKSI PENILAIAN DAN PENGKLASIFIKASIAN	8
387	KEPALA SEKSI PEMBINAAN	10
388	KEPALA SUBSEKSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KETERAMPILAN	8
389	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN	8
390	KEPALA SEKSI PERAWATAN	10
391	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN MAKANAN, MINUMAN, DAN PERLENGKAPAN	8
392	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN KESEHATAN	8
393	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	10
394	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8
XXX	**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II**	
395	KEPALA LEMBAGA KHUSUS ANAK KELAS II	12
396	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9
397	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	8
398	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8
399	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	9
400	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
401	KEPALA SUBSEKSI PENILAIAN DAN PENGKLASIFIKASIAN	8
402	KEPALA SEKSI PEMBINAAN	9
403	KEPALA SUBSEKSI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
404	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8
405	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
406	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8
XXXI	**RUMAH SAKIT UMUM PENGAYOMAN CIPINANG**	
407	KEPALA RUMAH SAKIT	12
408	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	10
409	KEPALA SUBBAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	10
XXXII	**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I**	
410	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I	12
411	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	9
412	KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN	9
413	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PERAWATAN	8
414	KEPALA SUBSEKSI BANTUAN HUKUM DAN PENYULUHAN	8
415	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8
416	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	9
417	KEPALA SUBSEKSI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8
418	KEPALA SUBSEKSI UMUM	8
419	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
XXXIII	**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA**	
420	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA	10
421	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8
422	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8
423	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
424	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8
XXXIV	**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB**	
425	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB	10
426	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8
427	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8
428	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8

B. DAFTAR NAMA JABATAN STAF KHUSUS DAN STAF AHLI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	16
2	STAF AHLI BIDANG PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI HUKUM	16
3	STAF AHLI BIDANG PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI	16
4	STAF KHUSUS BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN	16
5	STAF KHUSUS BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	16
6	STAF KHUSUS BIDANG PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TRANSFORMASI	16
7	STAF KHUSUS BIDANG ISU STRATEGIS	16
8	STAF KHUSUS BIDANG KOMUNIKASI DAN MEDIA	16

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI UTAMA	14
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI MADYA	12
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI MUDA	10

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI PERTAMA	8
2	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PENYELIA	9
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MAHIR	8
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL	7
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA	6
3	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI UTAMA	14
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI MADYA	12
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI MUDA	10
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI PERTAMA	8
4	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PENYELIA	9
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MAHIR	8
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERAMPIL	7
5	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI UTAMA	14
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI MADYA	12
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI MUDA	10
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI PERTAMA	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
6	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PENYELIA	9
	PENGAMAN PEMASYARAKATAN MAHIR	8
	PENGAMAN PEMASYARAKATAN TERAMPIL	7
	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PEMULA	6
7	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	9
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	8
8	ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA	12
	ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA	10
	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	8
9	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	11
	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	9
	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	8
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA	14
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
11	ANALIS KERJA SAMA AHLI UTAMA	14
	ANALIS KERJA SAMA AHLI MADYA	12
	ANALIS KERJA SAMA AHLI MUDA	10
	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	8
12	ANALIS KEUANGAN NEGARA AHLI MADYA	12
	ANALIS KEUANGAN NEGARA AHLI MUDA	10
	ANALIS KEUANGAN NEGARA AHLI PERTAMA	8
13	ANALIS KEUANGAN NEGARA PENYELIA	9
	ANALIS KEUANGAN NEGARA MAHIR	8
	ANALIS KEUANGAN NEGARA TERAMPIL	7
14	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MADYA	12
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	10
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	8
15	PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA	9
	PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	8
	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
16	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI UTAMA	14
	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MADYA	12
	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA	10
	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	8
17	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI UTAMA	14
	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12
	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10
	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8
18	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA	8
	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR	7
	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	6
19	APOTEKER AHLI MADYA	11
	APOTEKER AHLI MUDA	9
	APOTEKER AHLI PERTAMA	8
20	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8
	ASISTEN APOTEKER MAHIR	7
	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	6

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
21	ARSIPARIS AHLI MADYA	11
	ARSIPARIS AHLI MUDA	9
	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8
22	ARSIPARIS PENYELIA	8
	ARSIPARIS MAHIR	7
	ARSIPARIS TERAMPIL	6
23	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI UTAMA	14
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8
24	KONSELOR ADIKSI AHLI MADYA	11
	KONSELOR ADIKSI AHLI MUDA	9
	KONSELOR ADIKSI AHLI PERTAMA	8
25	ASISTEN KONSELOR ADIKSI PENYELIA	8
	ASISTEN KONSELOR ADIKSI MAHIR	7
	ASISTEN KONSELOR ADIKSI TERAMPIL	6

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
26	ASISTEN PENATA ANESTESI PENYELIA	8
	ASISTEN PENATA ANESTESI MAHIR	7
	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	6
27	STATISTISI AHLI UTAMA	13
	STATISTISI AHLI MADYA	11
	STATISTISI AHLI MUDA	9
	STATISTISI AHLI PERTAMA	8
28	ASISTEN STATISTISI PENYELIA	8
	ASISTEN STATISTISI MAHIR	7
	ASISTEN STATISTISI TERAMPIL	6
29	AUDITOR AHLI UTAMA	14
	AUDITOR AHLI MADYA	12
	AUDITOR AHLI MUDA	10
	AUDITOR AHLI PERTAMA	8
30	AUDITOR PENYELIA	9
	AUDITOR MAHIR	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	AUDITOR TERAMPIL	6
31	BIDAN AHLI MADYA	11
	BIDAN AHLI MUDA	9
	BIDAN AHLI PERTAMA	8
32	BIDAN PENYELIA	8
	BIDAN MAHIR	7
	BIDAN TERAMPIL	6
33	DOKTER AHLI UTAMA	14
	DOKTER AHLI MADYA	12
	DOKTER AHLI MUDA	10
	DOKTER AHLI PERTAMA	9
34	DOKTER GIGI AHLI MADYA	12
	DOKTER GIGI AHLI MUDA	10
	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	9
35	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MADYA	11
	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MUDA	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	8
36	FISIOTERAPIS AHLI MADYA	11
	FISIOTERAPIS AHLI MUDA	9
	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	8
37	FISIOTERAPIS PENYELIA	8
	FISIOTERAPIS MAHIR	7
	FISIOTERAPIS TERAMPIL	6
38	MANGGALA INFORMATIKA AHLI UTAMA	13
	MANGGALA INFORMATIKA AHLI MADYA	12
	MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA	10
	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	8
39	NUTRISIONIS AHLI MUDA	9
	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8
40	NUTRISIONIS PENYELIA	8
	NUTRISIONIS MAHIR	7
	NUTRISIONIS TERAMPIL	6

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
41	PENERJEMAH AHLI MADYA	11
	PENERJEMAH AHLI MUDA	9
	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	8
42	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA AHLI MADYA	12
	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA AHLI MUDA	10
	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA AHLI PERTAMA	8
43	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA PENYELIA	9
	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA MAHIR	8
	PENGAWAS KEUANGAN NEGARA TERAMPIL	7
44	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA	12
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	10
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8
45	PENILAI AHLI MADYA	12
	PENILAI AHLI MUDA	10
	PENILAI AHLI PERTAMA	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
46	PENILAI PEMERINTAH AHLI MADYA	12
	PENILAI PEMERINTAH AHLI MUDA	10
	PENILAI PEMERINTAH AHLI PERTAMA	8
47	PENYULUH HUKUM AHLI MADYA	11
	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	9
	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	8
48	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9
	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8
49	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	12
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	10
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	8
50	PERAWAT AHLI MADYA	11
	PERAWAT AHLI MUDA	9
	PERAWAT AHLI PERTAMA	8
51	PERAWAT PENYELIA	8
	PERAWAT MAHIR	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PERAWAT TERAMPIL	6
52	PEREKAM MEDIS PENYELIA	8
	PEREKAM MEDIS MAHIR	7
	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	6
53	PERENCANA AHLI MADYA	12
	PERENCANA AHLI MUDA	10
	PERENCANA AHLI PERTAMA	8
54	PRANATA HUMAS AHLI UTAMA	14
	PRANATA HUMAS AHLI MADYA	12
	PRANATA HUMAS AHLI MUDA	10
	PRANATA HUMAS AHLI PERTAMA	8
55	PRANATA HUMAS PENYELIA	9
	PRANATA HUMAS MAHIR	8
	PRANATA HUMAS TERAMPIL	7
56	PRANATA KOMPUTER AHLI UTAMA	13
	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9
	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8
57	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8
	PRANATA KOMPUTER MAHIR	7
	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6
58	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	11
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	9
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8
59	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	7
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6
60	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI MUDA	9
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMA	8
61	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MUDA	9
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
62	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PENYELIA	8
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MAHIR	7
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	6
63	PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA	11
	PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA	9
	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	8
64	PUSTAKAWAN AHLI MADYA	11
	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	9
	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	8
65	PUSTAKAWAN PENYELIA	8
	PUSTAKAWAN MAHIR	7
	PUSTAKAWAN TERAMPIL	6
66	RADIOGRAFER AHLI MUDA	9
	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	8
67	RADIOGRAFER PENYELIA	8
	RADIOGRAFER MAHIR	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	RADIOGRAFER TERAMPIL	6
68	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI MUDA	9
	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	8
69	TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA	8
	TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR	7
	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	6
70	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MUDA	9
	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8
71	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA	8
	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR	7
	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	6
72	PERAWAT GIGI / TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA	11
	PERAWAT GIGI / TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA	9
	PERAWAT GIGI / TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	8
73	PERAWAT GIGI / TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PERAWAT GIGI / TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	7
	PERAWAT GIGI / TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	6
74	WIDYAISWARA AHLI UTAMA	14
	WIDYAISWARA AHLI MADYA	12
	WIDYAISWARA AHLI MUDA	10
	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	8
75	GURU BESAR/PROFESOR	15
	LEKTOR KEPALA	13
	LEKTOR	11
	ASISTEN AHLI	9

D. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7
2	PENATA KELOLA PEMASYARAKATAN	7
3	PENATA KEPROTOKOLAN	7
4	PENGASUH MAHASISWA/PRAJA/TARUNA	7
5	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7
6	PENATA KELOLA OBAT DAN MAKANAN	7
7	TEKNISI LABORATORIUM	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
8	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6
9	OPERATOR LABORATORIUM	6
10	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMASYARAKATAN	6
11	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	6
12	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6
13	PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN	6
14	PENGELOLA SARANA PEMASYARAKATAN	6
15	DOKUMENTALIS HUKUM	6
16	ASISTEN KELOLA OBAT DAN MAKANAN	5
17	NAKHODA KELAS IV	5
18	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5
19	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5
20	PENJAGA TAHANAN	5
21	PETUGAS PENGAMANAN PEMASYARAKATAN	5
22	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO